





|                     |       |             |             |             |             |
|---------------------|-------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 9                   | 40-44 | 107         | 157         | 264         | 12,43%      |
| 10                  | 45-49 | 45          | 47          | 92          | 27%         |
| 11                  | 50-54 | 145         | 128         | 273         | 9,12%       |
| 12                  | 55-58 | 132         | 130         | 262         | 19,50%      |
| 13                  | >59   | 25          | 27          | 52          | 47,90%      |
| <b>Jumlah Total</b> |       | <b>1193</b> | <b>1298</b> | <b>2491</b> | <b>100%</b> |

Sumber: RPJM-Des tahun 2014-2019, Desa Rebono.

Dari data di atas nampak bahwa penduduk usia produktif pada usia 20-49 tahun Desa Rebono sekitar 2026 atau hampir 1,56%. Hal ini merupakan modal berharga bagi pengadaan tenaga produktif dan SDM.

Tingkat kemiskinan di Desa Rebono termasuk tinggi. Dari jumlah 2026 KK diatas, sejumlah 567 KK tercatat sebagai Pra Sejahtera, 315 KK tercatat keluarga Sejahtera I, 207 KK tercatat Keluarga Sejahtera II, 212 KK tercatat Keluarga Sejahtera III, 106 KK sebagai sejahtera III plus. Jika KK golongan Pra-sejahtera dan KK golongan I digolongkan sebagai KK golongan miskin, maka lebih dari 50% KK Desa Rebono adalah keluarga miskin. Dalam pernyataan yang disampaikan Bapak Hamse selaku Bendahara desa adalah:

“Angka partisipasi kerja perempuan kurang lebih 60% sebagai petani, sedangkan angka kerja perempuan (perempuan kerja dan sebagai kepala rumah tangga) kurang lebih 30% sebagai buruh tani. Angaka Partisipasi Kerja di desa Rebono bisa disimpulkan yang mendapat bantuan sejumlah 28 KRTP. Meliputi: 16 KRTP yaitu dari Dusun Asem Jajar dan Rebono Timur (Kel. Manga), dan 12 KRTP dari Rebono Barat (Kel. Dukuh)”<sup>2</sup>

Secara administratif, Desa Rebono terletak di wilayah Kecamatan

Wonorejo Kabupaten Pasuruan dengan posisi dibatasi oleh wilayah Desa-desa

<sup>2</sup> Hamse, Wawancara dirumahnya, Pada tanggal 4 Nopember 2016, Pukul 14.30 WIB sampai selesai.

tetangga. Di Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Pajajaran Kecamatan Rembang. Di sebelah Barat bebatasan dengan Desa Candi Robo Kecamatan Sukorejo. Di sebelah Selatan bebatasan dengan Desa Krangking Kecamatan Sukorejo, sedangkan di sebelah Timur berbatasan dengan Desa Karangsono Kecamatan Wonorejo.

Pembagian Wilayah Desa Rebono terdiri dari 4 Dusun yaitu: Asem Jajar I, Asem Jajar II, Rebono Timur, Rebono Barat. Yang masing-masing Dusun di pimpin oleh seorang kepala Dusun. Posisi kasun menjadi sangat berarti seiring banyaknya limpahan tugas desa kepada aparat ini. Dalam rangka memaksimalkan fungsi pelayanan terhadap masyarakat di Desa Rebono, dari keempat Dusun tersebut terbagi menjadi 10 Rukun Warga (RW) dan 25 Rukun Tetangga (RT).

Jarak tempuh Desa Rebono ke ibu kota Kecamatan adalah 10 km, yang dapat ditempuh dengan waktu sekitar 10 menit. Sedangkan jarak tempuh ke ibu kota kabupaten adalah 27 km, yang dapat ditempuh dengan waktu sekitar 60 menit.

### **3. 2. Aspek Pendidikan**

Pendidikan adalah satu hal penting dalam memajukan tingkat SDM (Sumber Daya Manusia) yang dapat berpengaruh dalam jangka panjang pada peningkatan perekonomian. Dengan tingkat pendidikan yang tinggi maka



Manusia yang ada. Tingkat SDM yang rendah akan berpengaruh pada peningkatan perekonomian pada tiap-tiap keluarga. Faktor pandangan hidup masyarakat, bagi Ibu yang mempunyai anak perempuan cukup hanya menyekolahkan anaknya sampai di tingkat Sekolah Dasar karena anak perempuan yang sudah lulusan SD langsung dinikahkan. Pandangan mereka bahwa anak perempuan nantinya juga akan kembali pada dapur (macak, masak, manak). Perempuan dalam hal ini memiliki pandangan hidup yang rendah dan kecil kemungkinan angka partisipasi perempuan dalam hal membangun perekonomian dalam keluarganya.

Sedangkan sarana pendidikan di Desa Rebono baru tersedia di tingkat pendidikan dasar 9 tahun (SD dan SMP), sementara untuk pendidikan tingkat menengah ke atas berada di tempat lain yang relatif jauh. Sebenarnya ada solusi yang bisa menjadi alternatif bagi persoalan rendahnya sumber daya manusia (SDM) di Desa Rebono yaitu melalui pelatihan dan kursus. Namun sarana atau lembaga ini ternyata juga belum tersedia dengan baik di Desa Rebono. Bahkan beberapa lembaga bimbingan belajar dan pelatihan yang pernah ada tidak bisa berkembang.

### **3. 3. Aspek Kesehatan**

Masalah pelayanan kesehatan adalah setiap warga masyarakat dan merupakan hal yang penting bagi peningkatan kualitas masyarakat ke depan.

Masyarakat yang produktif harus didukung oleh kondisi kesehatan. Salah satu cara mengukur tingkat kesehatan masyarakat dapat dilihat dari banyaknya masyarakat yang terserang penyakit. Dari data yang ada menunjukkan adanya jumlah masyarakat yang terserang penyakit relatif cukup tinggi.

Adapun penyakit yang sering diderita antara lain demam berdarah, penyakit sistem otot dan jaringan pengikat. Data tersebut menunjukkan bahwa gangguan kesehatan yang sering dialami oleh penduduk adalah penyakit yang bersifat cukup berat dan memiliki durasi lama bagi kesembuhannya, yang disebabkan oleh perubahan cuaca serta kondisi lingkungan yang kurang sehat. Ini tentu mengurangi daya produktifitas masyarakat Desa Rebono secara umum.

Hal yang perlu dipaparkan disini yaitu terkait keikutsertaan masyarakat dalam KB. Terkait hal ini peserta KB aktif tahun 2010 di Desa Rebono berjumlah 1449 pasangan usia subur. Sedangkan jumlah tingkat kelahiran bayi yang melahirkan di puskesmas atau polindes yang tersedia di Desa Rebono berjumlah 315 bayi lahir pada tahun 2010. Hal inilah kiranya yang perlu ditingkatkan perhatiannya agar kualitas balita Desa Rebono ke depan lebih baik.

Untuk itu masyarakat Desa Rebono harus benar-benar memperhatikan kondisi kesehatan tubuh. Karena kesehatan merupakan sebuah kebutuhan

jasmani yang harus dipenuhi agar kita bisa menjalankan aktivitas sehari-hari dengan baik. Dan dengan kesehatan tubuh yang terjaga kita bisa menjalankan pekerjaan dengan baik supaya bisa membantu pertumbuhan ekonomi dalam keluarga. Kalau dalam keluarga ada yang jatuh sakit, maka otomatis dalam keluarga tersebut tidak ada yang bekerja dan pendapatan ekonomi dalam keluarga ikut berkurang.

### **3. 4. Aspek Sosial Politik**

Dengan adanya perubahan dinamika politik dan sistem politik di Indonesia yang lebih demokratis, memberikan pengaruh kepada masyarakat untuk menerapkan suatu mekanisme politik yang dipandang lebih demokratis. Dalam konteks politik lokal Desa Rebono, hal ini tergambar dalam pemilihan kepala desa dan pemilihan-pemilihan lain (pilleg, pilpres, pilukada, dan pilgub) yang juga melibatkan warga masyarakat secara umum.

Untuk pemilihan kepala Desa Rebono, sebagaimana tradisi kepala desa di Jawa, biasanya para peserta (kandidat) adalah mereka yang secara tradisi memiliki hubungan dengan elit kepala desa yang lama. Hal ini tidak terlepas dari anggapan masyarakat banyak di desa-desa bahwa jabatan kepala desa adalah jabatan garis tangan keluarga-keluarga tersebut. Fenomena inilah yang biasa disebut "*pulung*" dalam tradisi Jawa bagi keluarga-keluarga tersebut. Jabatan kepala desa merupakan jabatan yang tidak serta merta dapat

diwariskan kepada anak cucu. Mereka dipilih karena kecerdasan, etos kerja, kejujuran dan kedekatannya dengan warga desa. Kepala desa bisa diganti sebelum masa jabatannya habis, jika ia melanggar peraturan maupun norma-norma yang berlaku. Begitu pula ia bisa diganti jika ia berhalangan tetap.

Karena demikian, maka setiap orang yang memiliki dan memenuhi syarat-syarat yang sudah ditentukan dalam perundangan dan peraturan yang berlaku, bisa mengajukan diri untuk mendaftar menjadi kandidat kepala desa. Fenomena ini juga terjadi pada pemilihan Desa Rebono pada tahun 2007. Pada pemilihan kepala desa ini partisipasi masyarakat sangat tinggi, hampir 95%. Tercatat ada dua kandidat kepala desa pada waktu itu yang mengikuti pemilihan kepala desa. Pilihan kepala desa bagi warga masyarakat Desa Rebono seperti acara perayan desa. Setelah proses politik selesai, situasi desa kembali berjalan normal. Hiruk pikuk warga dalam pesta demokrasi desa berakhir dengan kembalinya kehidupan sebagaimana awal mulanya. Masyarakat tidak terus menerus terjebak dalam sekat-sekat kelompok pilihannya. Hal ini ditandai dengan kehidupan yang penuh tolong menolong maupun gotong royong.

Berdasarkan deskripsi diatas, dapat dipahami bahwa Desa Rebono mempunyai dinamika politik lokal yang bagus. Hal ini terlihat baik dari segi pola kepemimpinan, mekanisme pemilihan kepemimpinan, sampai dengan partisipasi masyarakat dalam menerapkan sistem politik demokratis kedalam













## **2. Rembug Warga**

Sekretariat Desa menyelenggarakan rembug warga dan difasilitasi oleh tim Fasilitasi Kecamatan dan tenaga pendamping Kabupaten. Rembug warga dilaksanakan sekaligus sebagai media sosialisasi PFK di tingkat Desa. Rembug warga bertujuan menjelaskan kepada Stakeholder terkait tentang PFK, mensosialisasikan Sekretariat Desa dan Pendamping Desa, sekaligus untuk memastikan bahwa Bantuan Keuangan Khusus PFK telah dianggarkan dalam APB Desa. Rembug warga di Desa diikuti unsur: seluruh anggota Sekretariat Desa, BPD, Kasun lokasi RTS (rumah tangga sasaran), perwakilan KRTP, tokoh masyarakat dan pendamping Desa.

Agenda rembug warga meliputi: penjelasan atau sosialisasi PFK, klarifikasi penerima bantuan dan memastikan bahwa bantuan keuangan khusus PFK telah dianggarkan dalam APB Desa. Guna meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap PFK, maka sosialisasi bisa dilaksanakan secara variatif, antara lain melalui papan informasi, media hiburan, poster, pamflet, spanduk, pameran, dan tidak hanya dilakukan melalui media pertemuan. Sekretariat Desa juga melaksanakan sosialisasi secara informal, terutama kepada KRTP sasaran program.

## **3. Klarifikasi Penerima Bantuan**

Kegiatan ini dilaksanakan untuk memastikan calon sasaran hasil verifikasi dan fasilitasi usulan kebutuhan KRTP masih layak memperoleh bantuan. Apabila ada calon KRTP sasaran sudah tidak memenuhi

persyaratan maka dilakukan pengganti dengan prosedur sesuai dengan ketentuan dalam kegiatan verifikasi dan Fasilitasi Usulan Kebutuhan KRTP. Adapun Kriteria KRTP yang layak untuk menerima bantuan antara lain: telah bercerai, suami meninggal, ditinggal suami dalam waktu yang lama dan tidak mendapatkan nafkah (diterlantarkan), serta memiliki suami yang difabel dan atau mengalami sakit menahun sehingga tidak bisa melakukan aktivitas produktif.

KRTP yang menjadi sasaran Jalin Matra PFK dinilai tidak layak menjadi sasaran apabila secara faktual dalam kondisi antara lain: KRTP dimaksud telah menikah lagi, meninggal dunia atau pindah dan sudah tidak ada ART yang memenuhi kualifikasi, berdasarkan hasil rembuk warga terbatas dianggap sudah memiliki status sosial ekonomi lebih baik, yang dituangkan dalam berita acara mengetahui Kades dan pendamping Desa terpilih, ART (termasuk KK) hanya tinggal 1 orang, menolak bantuan.

KRTP yang layak menerima bantuan di tetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Desa tentang penerimaan bantuan Penanggulangan Feminisasi Kemiskinan tahun 2016 yang berisi ID, nama, alamat, jenis kelamin, nominal besaran bantuan, rencana usaha. Khusus untuk lokasi yang belum dilakukan verifikasi dan fasilitasi usulan kebutuhan KRTP, tahapan klarifikasi ini sekaligus merupakan tahapan verifikasi dan fasilitasi usulan kebutuhan KRTP.





- 3) Dokumen permohonan pencairan dana disampaikan kepada Gubernur melalui Bapemas Provinsi.
  - 4) Setelah verifikasi dokumen permohonan pencairan dana dilakukan secara berjenjang dan dinyatakan lengkap, selanjutnya Bapemas Provinsi Jawa Timur menerbitkan Surat Permohonan Pencairan (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM).
  - 5) Dana bantuan keuangan ditransfer langsung ke rekening Pemerintah Desa melalui Bank Jatim.
- b. Pengajuan Pencairan Bantuan KRTP
- 1) Ketua Pokmas KRTP mengajukan surat permohonan pencairan dana kepada Kepala Desa dengan dilampiri daftar anggota pokmas dan rencana Usaha KRTP.
  - 2) Pemerintah Desa segera mentransfer dana bantuan untuk KRTP dari rekening pemerintah Desa ke rekening pokmas KRTP selambat-lambatnya 10 hari kerja.

## **7. Pencairan Bantuan Pokmas KRTP**

- a. Ketua dan bendahara Pokmas KRTP melakukan pencairan bantuan dengan mengetahui ketua Sekretariat Desa dan pendamping desa dengan mempertimbangkan kesiapan pokmas dan KRTP.
- b. Pencairan bantuan dilaksanakan dalam 2 tahap sebagai berikut:
  - Pencairan bantuan tahap ke-1 maksimal 60% yang dipergunakan untuk modal investasi usaha.











